# Manajemen Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Berbasis Kebutuhan Pasar Kerja

#### Samsu\*

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi e-mail: samsu.su@yahoo.co.id

#### **Abstrak**

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) merupakan suatu lembaga dalam perguruan tinggi yang diberi kewenangan untuk mempersiapkan tenaga pendidik profesional pada jenjang pendidikan Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Raudhatul Athfal (RA). LPTK sebagai lembaga merupakan instrumen dalam meningkatkan kompetensi calon pendidik (guru) yang akan mengajar pada jenjang pendidikan MA/MTs/MI/RA. LPTK diberi amanah untuk menyiapkan calon guru yang siap memenuhi kebutuhan pasar kerja terdidik (skill labour). Artikel ini membicarakan manajemen LPTK dalam kaitannya dengan penyiapan calon guru dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja Pembicaraan dalam artikel ini diarahkan dalam manajemen LPTK ke arah memenuhi kebutuhan pasar kerja yang diawali dengan pembahasan tentang posisi Indonesia dalam interaksinya dengan masyarakat global, persoalan pendidikan hari ini, LPTK dan transformasi pendidikan, pengembangan program LPTK, LPTK dan pengembangan profesi keguruan, perangkat pendukung LPTK, penataan kurikulum LPTK berbasis entrepreneurship, manajemen LPTK.

Kata Kunci: Persoalan Pendidikan, Peran LPTK, Entrepreneurship

<sup>\*</sup> Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia

#### A. Pendahuluan

Indonesia di tengah interaksi global antara lain melalui Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang diberlakukan pada awal 2016 dihadapkan pada persoalan penyediaan sumber daya manusia (human capital) atau sering disebut dengan human resources yang berkualitas dan berdaya saing tinggi terutama dalam merebut pangsa pasar, baik di sektor pemerintahan di sektor publik. Masyarakat global hari mempersyaratkan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi merupakan institusi yang diberi kewenangan untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tersebut. Meskipun kenyataannya apa yang dihadapi oleh pendidikan khususnya di Indonesia saat ini masih sangat rendah. Hal ini diukur dari Human Development Index (HDI) saat ini (2013) masih berada pada posisi 108 (0.684) dari 187 negara dan berada pada posisi medium human development<sup>1</sup>. Selain itu, persoalan pendidikan kita hari ini masih dihadapkan dengan berbagai isu, persoalan SDM yang berkualifikasi, persoalan moralitas, persoalan lapangan kerja, persoalan profesi dan persoalan daya saing bangsa, hingga pada persoalan pengangguran. Karena itu, penting untuk diangkat dalam makalah ini mengenai pendidikan dan persoalan-persoalannya hari ini, serta bagaimana membangun pendidikan yang transformatif, serta mampu melahirkan tenaga kerja khususnya di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Human Development Reports dari United nations Programme, http://hdr.undp.org/en/ content/human-development-index-hdi, Diakses pada tanggal 21 Oktober 2015.

bidang tenaga pendidik dan kependidikan, serta inter-relasinya dengan penyiapan kebutuhan pasar kerja.

#### B. Pembahasan

### 1. Pendidikan dan Persoalan Kependidikan Hari ini

Kita menyadari bahwa pendidikan di tanah air telah memiliki banyak kemajuan, namun seiring dengan itu, di tengahtengah kemajuan yang ada pendidikan kita dihadapkan juga pada sejumlah persoalan. Icha Ariska (2015) menyatakan Sistem pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat sebagai suprasistem². Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya sebagai suprasistem tersebut dimana sistem pendidikan menjadi bagiannya, menciptakan kondisi sedemikian rupa sehinngga permasalahan intern sistem sistem pendidikan itu menjadi sangat kompleks.

Dalam pandangan Elni (2015) bahwa masalah pertama adalah bahwa pendidikan, khususnya di Indonesia, menghasilkan "manusia robot". dikatakan demikian karena pendidikan yang diberikan ternyata berat sebelah, dengan kata lain tidak seimbang. Pendidikan ternyata mengorbankan keutuhan, kurang seimbang antara belajar yang berpikir (kognitif) dan perilaku belajar yang

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Icha Ariska. http://blogterpercayaku.blogspot.co.id/2015/03/masalah-masalah-pendidikan-di-indonesia.html Diakses pada tanggal 5 Februari 2016.

merasa (afektif)3. Jadi unsur integrasi cenderung semakin hilang, yang terjadi adalah disintegrasi. Padahal belajar tidak hanya berpikir. Sebab ketika orang sedang belajar, maka orang yang sedang belajar tersebut melakukan berbagai macam kegiatan, seperti mengamati, membandingkan, meragukan, menyukai, semangat, dan sebagainya. Hal yang sering disinyalir ialah pendidikan sering kali dipraktikkan sebagai sederetan instruksi dari guru kepada murid/siswa. Apalagi dengan istilah yang sekarang sering digembar-gemborkan sebagai "pendidikan yang menciptakan manusia siap pakai". Dan "siap pakai" di sini berarti tenaga-tenaga yang dibutuhkan menghasilkan pengembangan dan persaingan bidang industri dan teknologi. Sementara itu, dalam pandangan Aziz (2005) permasalahan pendidikan di negara kita tidak berdiri sendiri, tapi kait-mengait dengan benang kusut permasalahan bangsa kita lainnya, baik dari segi politik, ekonomi, sosial dan budaya4.

Diantara persoalan-persoalan tersebut adalah persoalan penyiapan sumber daya manusia berkualifikasi, munculnya persoalan moralitas, persoalan lapangan kerja, persoalan profesi, serta persoalan daya saing bangsa, di samping isu-isu pendidikan lainnya. Apa yang diperlukan oleh pendidikan kita hari ini adalah tersedianya layanan pendidikan yang mampu menganulir sejumlah persoalan tersebut dengan membangun LPTK yang

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Elni Handayani. 2015. http://www.kompasiana.com/elnihandayani/masalah-pendidikan-di-indonesia-dan-solusinya . Diakses pada tanggal 5 Februari 2016

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abdul Aziz. 2005. *'Transformasi Guru*. Dalam Majalah Transformasi, edisi 37/Februari 2005. Lembaga Pers UNJ: Jakarta.

mampu melakukan transformasi pendidikan ke arah yang diharapkan.

#### 2. LPTK dan Transformasi Pendidikan

Dilihat dari sisi filosofis, secara kuantitatif dan kualitatif lembaga pendidikan kita hari ini belum sepenuhnya mampu untuk melahirkan sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk menjadi aset nasional, baik dilihat dari sisi ketersediaan sumber daya manusia berkualifikasi, kemampuan menangkal isuisu moralitas, persoalan lapangan kerja, persoalan profesi, serta persoalan daya saing bangsa. Ini tidak lain karena, terlalu cepatnya pengaruh eksternal pendidikan berbanding dengan transformasi pendidikan di dalamnya. Akibatnya, pendidikan tidak mampu untuk menyiapkan lulusannya untuk menghadapi pasaran kerja ideal. Dalam konteks inilah, maka perlu dibangun filosofi berfikir bahwa pendidikan perlu selalu ditransformasikan sejalan dengan perkembangan eksternal pendidikan, dan salah satu jawabannya hari ini ialah perlunya dikembangkan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang nantinya diharapkan mampu menjadi motor penggerak lahirnya sumber daya pendidik yang terstandarkan, terutama dalam memenuhi kompetensi dasarnya sebagai pendidik yang memiliki kompetensi paedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial..

Rasionalitas perlunya dikembangkan LPTK ini adalah karena masa depan bangsa, kompetisi negara, penyiapan lapangan kerja, serta perkembangan pribadi peserta didik banyak bertumpu pada peran guru, meskipun peran guru saat ini banyak disorot oleh berbagai kalangan. Guru masa lalu berbeda dengan

guru hari ini, terlebih-lebih lagi guru masa depan. Profesi guru seharusnya menjadi profesi yang profesional, tetapi realitasnya pendidikan kita hari ini masih dihadapkan pada lemahnya standar profesi guru sebagai profesional.

LPTK sebagai lembaga penyiapan SDM guru tidak saja diharapkan mampu menjadi lembaga yang menyiapkan sumber daya manusia keguruan yang lebih berorientasi pada pelatihan sebagaimana halnya dengan program kompetensi, dual mode system, PLPG, dan UKG dan sebagainya, akan tetapi LPTK diharapkan mampu menjadi media penyiapan keterbatasan tenaga keguruan yang profesional seiring dengan amanat UU No. 14 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah<sup>5</sup>. Sesuai dngan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru telah menggariskan bahwa penyediaan guru menjadi kewenangan lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Karena itulah harapanharapan ini menjadi rasional sehingga memungkinkan perlunya membangun LPTK yang berorientasi pada kebutuhan pasaran kerja<sup>6</sup>.

Dilihat dari sisi transformasi pendidikan, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta arus globalisasi yang terjadi, maka pendidikan dihadapkan pada persoalan bagaimana menata diri untuk lebih *adaptable* terhadap arus globalisasi

<sup>5</sup> Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Guru dan Dosen

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 200, tentang Guru

tersebut. Pendidikan sebenarnya bukan hanya sekedar bagaimana menyiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan kognitif, afektif dan psikomotik dalam belajar, tetapi lebih kepada bagaimana menyiapkan agar peserta didik setelah tamat belajar mampu untuk hidup dan berkiprah dalam hidup. Transformasi pendidikan harus dirancang sering dengan perubahan yang terjadi. Tanpa demikian, maka akan terjadi penumpukan SDM yang tidak siap pakai untuk kebutuhan pasar kerja. Karena itulah, maka perubahan wujud pendidikan dapat dipandang dari empat sisi, yaitu: 1) lembaga, 2) sistem masyarakat, 3) calon guru, 4) peserta didik.

Dari sisi lembaga, LPTK diharapkan mampu memastikan tercapai dan terukurnya standar kualitas penyelenggaran pendidikan profesi keguruan ke arah memenuhi kebutuhan pasar (market need), terutama mengurangi keterbatasan dan kelangkaan guru, meratanya kualitas dan kuantitas guru, munculnya lembaga pendidikan (sekolah/madrasah) yang berkeunggulan, meningkatnya layanan pendidikan. Dari sisi sistem masyarakat adalah terbangunnya pola kehidupan masyarakat secara ilmiah, padat karya, serta produktif dalam kerangka mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Dari sisi calon guru adalah terbangun rasa kepercayaan diri yang kuat dalam mengembangkan profesi, berubahnya mindset pendidikan dari sekedar mengajar dan mencerdaskan kepada memproduktifkan peserta didik dengan sejumlah keunggulan kerja sesuai dengan kecenderungan pasar global (trend global market) dan kearifan lokal (local wisdom), adapun dari sisi peserta didik adalah terbukanya informasi, akses dan kesempatan untuk berkarya sesuai dengan tipologi dan spesifikasi keilmuan yang diterima.

LPTK yang mampu menyiapkan calon guru memasuki pasaran kerja (global) adalah LPTK yang mampu memprediksi, mengukur, serta mampu mengikuti perkembangan pasar kerja global. Karena itu transformasi pendidikan ke arah memenuhi pasaran kerja tidak dapat dilakukan kecuali dengan membekali para calon guru dengan sejumlah keterampilan (skill) dalam bentuk hard skill dan soft skill dalam memasuki pasar kerja global. dimaksud adalah kemampuan skill yang mengoperasionalkan teori-teori keilmuan sesuai bidangnya sejalan dengan perkembangan teknologi, misalnya menguasai aplikasi teknologi pendidikan untuk kepentingan pengembanangan profesi, memiliki kemampuan bahasa untuk berinteraksi global. Adapun soft skill dimaksud adalah memiliki talenta profesi, memiliki performa yang baik dan menarik, memiliki kepercayaan diri (self conficence) yang baik, serta memiliki semangat kerja yang tinggi dengan mengedepankan produktivitas kerja, kaulitas kerja, inisiatif, semangat kerja tim, tanggungjawab, serta kemampuannya dalam menyelesaikan masalah.

## 3. Pengembangan Program LPTK

Menurut Azhar (2009) tenaga kependidikan dalam hal ini LPTK merupakan salah satu kunci utama berhasil atau tidaknya gerakan pendidikan dalam rangka memenuhi standar mutu, baik standar produk dan pelayanan maupun standar *customer* 

pendidikan pada umumnya<sup>7</sup>. Bagi Nurulpaik (2005) berpendapat kalau kita sepakat bahwa calon tenaga kependidikan harus dipersipkan secara professional dalam satu setting pengkondisian tertentu, maka lingkungan pendidikan harus didesain dan disiapkan sedemikian rupa, sehingga mampu membentuk karakter yang diharapkan<sup>8</sup>.

LPTK sebagai lembaga pencetak calon guru dalam kemitraannya dengan pihak-pihak terkait terutama dengan pemerintah dapat diberdayakan secara optimal untuk menjadi lembaga yang diharapkan mampu melakukan seleksi calon kepala sekolah, pelatihan calon kepala sekolah, pelatihan pengawas, pelibatan LPTK pada kegiatan KKG dan MGMP, pengembangan dan pengelolaan laboratorium dan perpustakaan, dan kemitraan LPTK dalam pengembangan entrepreneurship berbasis pasar kerja. Dengan peran-peran ini, maka LPTK secara profesional dimaksudkan untuk benar-benar mengukur standar kualitas pendidik, tenaga kependidikan, layanan serta penyelenggaran pendidikan itu sendiri agar dapat berjalan secara baik sesuai dengan tuntutan pasar. Dengan demikian dapat dipahami bahwa LPTK dapat berperan sebagai lokomotif perubahan manajemen pendidikan berbasis kebutuhan pasar. Selama ini standar kualitas pendidikan memang agak sulit untuk diukur karena tidak mainstream kelembagaan yang dibangun untuk mengakomodir kebutuhan standar kualitas tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Azhar. Kondisi LPTK sebagai Pencetak Guru yang Profesional, Jurnal Tabularasa PPs Unimed, 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Nurulpaik, Ke Mana Arah Pengembangan LPTK? Dalam *Pikiran Rakyat Cyber Media*. Diakses 5 Februari 2016.

# 4. LPTK dan Pengembangan Profesi Keguruan

Guru merupakan profesi mulia dan sangat berat. Profesi guru selama ini sering ditempatkan pada posisi marjinal, sekalipun semua orang mengganggap penting keberadaan para guru tersebut, namun fakta membuktikan bahwa perhatian kepada guru dan pendidikan masih 'setengah hati'. Hal itu secara kasat mata dapat kita saksikan, bagaimana nasib dan taraf hidup sebagian besar para guru di Indonesia, sehingga perlunya pengembangan profesi guru, fasilitas pendidikan yang masih memprihatinkan terutama di pedesaan dan daerah terpencil, dan juga sebagian wilayah perkotaan.

Sebagai lembaga, LPTK diharapkan memiliki peran dan tanggungjawab yang baik dalam pengembangan profesi keguruan, meskipun selama ini lembaga pendidikan guru atau lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) juga belum mendapat perhatian yang lebih baik, bahkan kadang 'ketinggalan' atau 'sengaja ditinggalkan'. Kompetensi profesional sebagai pendidik menurut Charles F. Johnson (Abin Syamsuddin, 1996:78) dikemukakan kompetensi yang harus dimiliki pendidik ada 6 unsur<sup>9</sup>:

a. Komponen kinerja (perfomance component) penampilan dari figur dibawah dapat terlihat sebagai puncak dari kegiatan kerja, dalam hal ini proses pembelajaran komponen kinerja ini terdiri dari beberapa perilaku yang sedang ditampilkan yang merupakan totalitas dari: pengetahuan, keterampilan dan proses.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Abin Syamsuddin, 1996: 78

- b. Komponen bahan pengajaran (reaching subject component); komponen bahan pengajaran adalah kumpulan ilmi-ilmu pengetahuan yang yang digabungkan dengan tujuan pembelajaran. Jadi, komponen ini berupa gagasan, faktafakta, nilai-nilai, proses atau keterampilan yang mana pengajar berusaha membantu siswa unruk memperolehnya.
- c. Komponen proses pengajaran (teaching process component) komponen penyesuaian berisi pemikiran elemen pengolahan (proses pembelajaran) yang memungkinkan pelaksanaan dari kompetensi komponen proses digunakan sebagai suatu acuan bagi kelompokteknik-teknik manusiawi yang mana kita memproduksi gagasan, menciptakan gagasan-gagasan, strategistrategi, membuat keputusan dan mengevaluasi kemajuan hasil pembelajaran.
- d. Komponen penyesuaian pribadi (the profesional adjusment component) komponen penyesuaian berisi elemen-elemen dasar penting terhadap penyesuaian individu pendidik dan karakteristik pribadinya ke arah penampilan kerja sesuai dengan kompetensinya. Penyesuaian untuk mempraktekkan keahliannya atau sikap mereka dan berupaya memperkecil atau mengurangi kelemahan atau kealfaan yang tidak sesuai dengan penampilan kompetensi lebih jauh lagi penyesuaian menghendaki penampilan kerja yang kreatif.
- e. Komponen profesional pengajaran (*the teaching profesional component*) komponen profesional meliputi batasan, fakta, prinsip-prinsip, keterampilan-keterampilan dan proses yang digabungkan dalam profesi pendidikan. Komponen profesional merupakan sumber dasar yang merupakan

kumpulan informasi teori dan praktisi dalam dunia pendidikan seperti: psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, sosiologi pendidikan, filsafat pendidikan, kurikulum, test dan pegukuran, manajemen pembelajaran, media pendidikan, dan lain sebagainya.

f. Komponen sikap (attitude component) komponen sikap berisi sari pati elemen-elemen sikap, nilai dan perasaan yang penting bagi dasar semua kompetensi pengajar/pendidik. Dengan adanya sikap positif terhadap sesuatu hal, akan terjadi perbuatan, dan kompetensi akan dapat dilaksanakan.

LPTK sebagai lembaga pencetak calon guru memiliki amanah dalam mengembangkan profesin keguruan. Amanah ini terwujud dalam bentuk perannya dalam menyiapkan calon guru yang memenuhi syarat kependidikan. Output LPTK diharapkan memiliki distingsi output profesi keguruan yang dapat diukur dari meningkatnya kinerja yang lebih tinggi (highly performance). Untuk memperoleh distingsi output LPTK yang baik ini, lulusan LPTK yang akan menjadi guru harus menguasai ketiga komponen trilogi profesi yang menurut Prayitno (2007): (1) komponen dasar keilmuan, (2) komponen substansi profesi, (3) komponen praktik profesi. Yang dimaksud komponen dasar keilmuan yaitu substansi bidang ilmu yang akan menjadi mata ajar yang dibina selama menjadi guru mata pelajaran. Keilmuan tersebut harus dikuasai dengan baik oleh setiap calon guru. Tidak ada tawar menawar. Calon guru yang tidak menguasai bidang kelimuannya secara baik, seharusnya tidak lolos menjadi calon guru, karena hal ini hanya akan merugikan persekolahan kita. Komponen kedua yakni substansi profesi yaitu ilmu keguruan yang antara lain berisi pedagogi, dedaktik dan metodik khusus mengajar, psikologi perkembangan dan sebagainya. Setiap calon guru harus menguasai keilmuan ini, agar dapat memberikan pelayanan mengajar dengan baik. Komponen pratik profesi yanitu berkaitan dengan performan mengajar di depan kelas. Para calon guru harus mengalami banyak praktik mengajar dikelas sebelum benarbenar menjadi guru di kelas. Kemampuan seperti ini dapat dilatihkan secara optimal apabila pendidikan guru ini dapat diasramakan. Namun lagi-lagi, ini membutuhkan biaya yang mahal. Maka kesiapan pemerintah dan masyarakat untuk menyediakan pembiayaan bagi pendidikan calon guru, harus menjadi perhatian para pengambil kebijakan.

# 5. Perangkat Pendukung LPTK

Dari sisi lembaga, ketersediaan perangkat pendukung LPTK seharusnya dirancang dalam memenuhi standar manajemen kelembagaan yang baik, job distribution, job description, departementalization, dan hirarki organisasi harus menjadi sistem kelembagaan LPTK yang benar-benar mampu mengukur ketercapaian sistem yang dibangun. Dari sisi tenaga instruktur, ketersediaan tenaga instruktur sebagai perangkat pendukung LPTK mestinya diperoleh melalui mekanisme yang ketat, terukur dan profesional. Tenaga instruktur ini merupakan persoalan inti dalam melahirkan calon guru yang baik dan berstandar. Karena itu, seleksi calon tenaga instruktur harus berasal dari tenaga profesional di bidangnya dalam mengembangkan kurikulum

LPTK. Tenaga profesional dimaksud adalah tenaga profesional yang menekuni bidang keahlian tertentu.

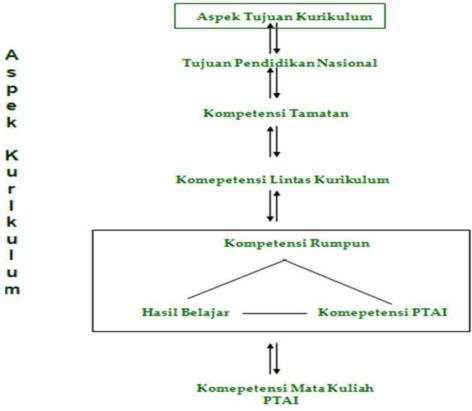
Dari sisi sistem jaringan, LPTK harus didukung oleh jaringan kemitraan dan sistem jaringan ICT yang baik. Jaringan kemitraan LPTK dimaksudkan untuk memberi penguatan kepada LPTK dalam berkolaborasi mengembangkan potensi daerah dalam bidang penyiapan calon tenaga guru profesional. Kekuatan LPTK ini sangat tergantung kepada kekuatan kemitraan dengan pemerintah daerah, karena daerah merupakan pengguna jasa (stakeholder) LPTK. Tanpa kemitraan, LPTK tidak mungkin akan mampu mengembangkan potensi pendidikan calon guru dengan baik sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu, sistem jaringan ICT merupakan perangkat teknologi yang dapat digunakan untuk membangun sistem informasi dalam bentuk pangkalan data (database). Database LPTK merupakan acuan, arah, dan tolok ukur pengembangan LPTK dengan sejumlah program-program yang dibangun. Selain itu, database dapat dijadikan patokan dalam pengambilan kebijakan oleh pemangku kepetingan dan pihak manajemen LPTK.

Melalui sistem informasi dan database dapat dilakukan diseminasi informasi kebutuhan pasar kerja bagi calon tenaga pendidikan seperti halnya guru. Standar, spesifikasi, bidang keilmuan, kompetensi serta kebijakan-kebijakan lain yang terkait dapat diserap secara cepat, mudah dan tepat sasaran. Dari sisi PPG, LPTK dapat menjadi media terselenggaranya pusat pendidikan guru (PPG). PPG pada LPTK dapat menawarkan sejumlah program strategis yang dirancang untuk pengembangan kurikulum, desain pembelajaran, penguatan metodologi

mengajar, pengembangan kemampuan microteaching keguruan, sarana belajar mandiri, dan sebagainya.

Dari sisi kurikulum, LPTK dapat dirancang agar dapat memberikan orientasi baru dalam pengembangan kurikulum yang berorientasi pada penguatan keterampilan (*skill*) mengajar bagi calon guru. Kurikulum dapat dirancanag sesuai dengan tingkat satuan pendidikan, jenjang pendidikan dan tingkatan usia peserta didik yang akan diajar oleh calon guru yang dibina oleh LPTK. Berikut ini beberapa aspek kurikulum PTAI yang dapat dikembangakan oleh LPTK dengan kompetensi berbasis kebutuhan pasar.

Manajemen Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan...

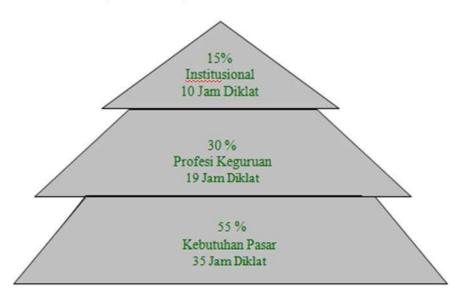


Gambar: Aspek kurikulum LPTK

### 6. Penataan Kurikulum LPTK berbasis Entrepreneurship

Dalam mendesain kurikulum LPTK perlu dijabarkan tentang pengertian, tujuan dan ruanglingkupn desain kurikulum LPTK, pendekatan sistem dalam desain kurikulum LPTK, penentuan karakteristik LPTK dan tujuannya, penentuan model-model desain kurikulum, penetapan materi ajar LPTK, langkah-langkah menyusun program dan kalender akademik LPTK, dan pengembangan bahan ajar (modul) LPTK. LPTK yang

dikembangkan berbasiskan muatan *entrepreneurship* dan kurikulum edupreneurship.



**Gambar**: Pengembangan Kurikulum LPTK Berbasis Kebutuhan Pasar

LPTK sebagai program baru dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) tenaga pendidik, LPTK dalam perkembangannya perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan (strengthening), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (treatment). Dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang kemungkinan akan terjadi, maka dapat dilakukan pemetaan potensi manajemen LPTK agar dapat dihindari berbagai kemungkinan yang dapat menghambat jalannya LPTK.

### 7. Manajemen LPTK

LPTK yang baik dan profesional adalah LPTK yang memiliki perencanaan (planning) yang baik. Perencanaan itu bisa saja dalam bentuk program, ukuran ketercapaian program, ketersediaan sumber daya pengelola LPTK, penentuan sasaran LPTK, kriteria dan indikator sasaran LPTK, pembiayaan, pemanfaatan output keluaran LPTK, target ketercapaian, standar capaian kinerja, penyelenggara dan standar kriteria pengelola LPTK, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan, serta sistem evaluasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, LPTK diharapkan tidak hanya berdiri sendiri, akan tetapi perlu membangun kemitraan (kerjasama) misalnya antara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau lembaga guru dengan pemerintah daerah (Pemda). pemproduksi Kerjasama ini dimaksudkan agar LPTK dapat memecahkan berbagai masalah pendidikan di daerah.

Dengan demikian, LPTK diharapkan dapat menjadi penyedia layanan pendidikan (educational service provider) bagin Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Kemenag dalam rangka pelatihan guru dan konsultasi untuk manajemen pendidikan. Selain itu, LPTK juga dimaksudkan agar mampu mengembangkan berbagai modul pelatihan untuk peningkatan mutu pendidik, melatih dosen-dosen di LPTK menjadi fasilitator pembelajaran aktif dan manajemen berbasis sekolah, melibatkan mereka dalam pendampingan sekolah-sekolah. Dengan kerjasama yang dibangun diharapkan akan menambah sumber daya, memperluas jaringan, membuka peluang kerjasama yang lebih luas dan memperkaya model-model intervensi yang akan kita lakukan ke daerah. Selain itu, LPTK juga dapat dimaksudkan untuk menjadi wahana seleksi calon kepala sekolah, pelatihan calon kepala sekolah, pelatihan pengawas, pelibatan LPTK pada kegiatan KKG dan MGMP, pengembangan dan pengelolaan laboratorium dan perpustakaan, bahkan sampai kepada pelatihan kurikulum nasional untuk guru, administrasi dan model pembelajaran, pemberdayaan KKG/MGMP dan pelatihan operator sekolah. Dalam membangun kerjasama dengan pemerintah daerah (Pemda) tersebut, LPTK diharapkan mampu menyediakan tenaga-tenaga yang berkualitas di bidangnya, dan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja khususnya di daerah.

#### **Daftar Pustaka**

Abdul Aziz. 2005. *Transformasi Guru*. Majalah Transformasi, edisi 37/Februari 2005. Lembaga Pers UNJ: Jakarta.

Azhar. 2009. Kondisi LPTK sebagai Pencetak Guru yang Profesional, Jurnal Tabularasa PPs Unimed.

Elni Handayani. 2015. dalam http://www.kompasiana.com/elnihandayani/masalah-pendidikan-di-indonesia-dan-solusinya\_551fe289813311186e9de629 diakses 5 Februari 2016.

- Manajemen Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan...
- http://fajar.co.id/fajaronline-sulsel/2015/10/17/usaid-inisiasi-kerjasama-lptk-dan-pemda.html#sthash.7lhbSKVO.dpuf, diakses 11 Januari 2016.
- Human Development Reports dari United Nations Programme diakses dari http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi pada 21 Oktober 2015.
- Icha Ariska. 2015. dalam http://blogterpercayaku.blogspot.co.id/2015/03/masalah-masalah-pendidikan-di-indonesia.html diakses 5 Februari 2016.
- Nurulpaik, Iik. 2005. *Ke Mana Arah Pengembangan LPTK*? Pikiran Rakyat Cyber Media (Kamis 02 June 2005) diakses 5 Februari 2016.
- Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru
- Prayitno, 2007. Trilogi Profesi Pendidik, FIP: UNP
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen